

# MEMBUMIKAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHARMONISAN SOSIAL

Oleh:

Ahmad Rasyid Ritonga<sup>1</sup>, Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [ahmadrasyid@gmail.com](mailto:ahmadrasyid@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article History:

Naskah Masuk : 2 Januari 2025

Naskah Direvisi : 18 Januari 2025

Naskah Disetujui : 22 Januari 2025

Tersedia Online : 24 Januari 2025

### Keywords:

Islamic Communication,  
Government Policy, Social Harmony

### Kata Kunci:

Komunikasi Islam, Kebijakan  
Pemerintahan, Keharmonisan  
Sosial



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya  
Pangus Academy

## ABSTRACT

*This research aims to explore the relevance of Islamic communication in government policies to realize social harmony in society. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, data were obtained from related literature and analyzed thematically. This study finds that the gap between the ideal of social harmony and the reality of government policies is influenced by lack of community participation, insensitivity to local contexts, and non-inclusive policies. Islamic communication, which emphasizes the principles of deliberation, justice, and respect for diversity, has proven effective in reducing social conflicts and building solidarity. Islamic values-based education also plays an important role in strengthening social harmony. This study recommends the government to integrate Islamic communication in public policy to create policies that are more responsive, inclusive, and adaptive to the needs of the community. This approach is expected to increase public participation, strengthen trust in the government, and create sustainable social cohesion.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi relevansi komunikasi Islam dalam kebijakan pemerintahan untuk mewujudkan keharmonisan sosial di masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data diperoleh dari literatur terkait dan dianalisis secara tematik. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan antara idealitas keharmonisan sosial dan realitas kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaksensitifan terhadap konteks lokal, dan kebijakan yang tidak inklusif. Komunikasi Islam, yang menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman, terbukti efektif dalam meredakan konflik sosial dan membangun solidaritas. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam juga memainkan peran penting dalam memperkuat harmoni sosial. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mengintegrasikan komunikasi Islam dalam kebijakan publik guna menciptakan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, serta menciptakan kohesi sosial yang berkelanjutan.

---

## **I. PENDAHULUAN**

Keharmonisan sosial merupakan kondisi ideal yang diidamkan oleh setiap masyarakat, di mana hubungan yang harmonis tidak hanya terwujud antarindividu, tetapi juga antarkelompok yang berbeda dalam aspek agama, etnis, dan budaya. Menurut Ule (2019), konsep keharmonisan, sebagaimana tercermin dalam budaya Tionghoa melalui ajaran Konfusianisme, menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat sebagai fondasi etis dan politik. Keharmonisan sosial tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sosial, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi dan sosial dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Pandangan serupa diungkapkan oleh Sinaga et al. (2019) yang menyebutkan bahwa harmoni sosial berperan dalam mendorong integrasi nasional. Namun, kondisi ini membutuhkan upaya strategis, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Kerukunan di tengah keberagaman menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian keharmonisan sosial memerlukan kebijakan yang inklusif dan mempertimbangkan pluralitas sebagai modal sosial yang berharga. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara idealitas keharmonisan sosial dan realitas yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak inklusif. Fatih (2018) mencatat bahwa kebijakan yang cenderung mengutamakan satu kelompok tertentu dapat memicu ketegangan antarumat beragama di Indonesia. Dalam beberapa kasus, hal ini memperlihatkan kurangnya sensitivitas terhadap dinamika sosial, yang berdampak pada melemahnya kerukunan antarkelompok.

Fenomena serupa juga diungkapkan oleh Han dan Liang (2015), yang mencatat bahwa urbanisasi dan liberalisasi pasar sering kali menyebabkan pergeseran struktur sosial. Pergeseran ini mengakibatkan melemahnya solidaritas sosial, sehingga pemerintah harus lebih bijaksana dalam merancang kebijakan yang mengutamakan keharmonisan. Ketidaksensitifan ini mengakibatkan ketegangan yang mengancam kohesi sosial. Faktor penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan yang kurang mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Williamson & Murphy, 2020). Akibatnya, kesenjangan ini tidak hanya memperburuk hubungan antarkelompok, tetapi juga menghambat pembangunan masyarakat yang harmonis.

Di sisi lain, komunikasi yang efektif dapat menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan ini. Komunikasi Islam, sebagai ajaran yang menekankan toleransi dan saling menghormati, menawarkan solusi yang relevan dalam konteks keragaman Indonesia. Dodi (2023) menekankan pentingnya dialog antarumat beragama sebagai sarana untuk meredakan ketegangan dan membangun kerukunan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong hubungan yang harmonis di tengah keberagaman. Pentingnya peran komunikasi Islam juga tercermin dalam pendidikan masyarakat. Lomas (2021) mencatat bahwa harmoni sosial dapat dicapai melalui pendidikan berbasis nilai-nilai spiritual dan moral. Pendidikan ini tidak hanya mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang mengedepankan komunikasi Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.

Selain itu, Pertiwi (2023) menunjukkan bahwa integrasi identitas sosial dalam hubungan antaragama mampu memperkuat kerukunan. Komunikasi Islam yang mengedepankan dialog inklusif dapat menjadi instrumen strategis untuk mengatasi konflik yang sering kali timbul akibat perbedaan identitas. Pemerintah dapat memanfaatkan pendekatan ini dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Sebagai upaya untuk menjawab tantangan ini, penelitian tentang "Membumikan Komunikasi Islam dalam

Kebijakan Pemerintahan untuk Mewujudkan Keharmonisan Sosial" menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mendukung keharmonisan sosial, dan memperkuat kohesi di tengah keragaman masyarakat.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi relevansi komunikasi Islam dalam kebijakan pemerintahan untuk mewujudkan keharmonisan sosial (Creswell, 2013). Sumber data penelitian ini mencakup data sekunder dari literatur yang relevan, seperti jurnal akademik dan laporan kebijakan (Moleong, 2018). Analisis data menggunakan pendekatan tematik dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992). Teknik keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan (Chatra et al., 2023).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kesenjangan Ideal Keharmonisan Sosial dan Realitas Kebijakan Pemerintahan

Keharmonisan sosial merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas masyarakat. Idealnya, pemerintah memainkan peran penting dalam mewujudkan keharmonisan ini melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara cita-cita ini dan implementasi kebijakan di lapangan. Tangcharoensathien (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah kunci dalam memastikan penerimaan dan efektivitas kebijakan, tetapi kurangnya keterlibatan ini sering menjadi penyebab utama ketidaksesuaian antara kebijakan dan harapan masyarakat.

Faktor pertama yang memengaruhi kesenjangan ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian Alfiana et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, cenderung lebih berhasil. Sayangnya, banyak kebijakan masih dirancang secara *top-down* tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Sebagai contoh, survei pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 37% masyarakat di negara-negara OECD merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan sering kali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan ini. Cheung dan Leung (2012) menemukan bahwa kohesi sosial meningkat ketika masyarakat merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa diabaikan, hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan tetapi juga menimbulkan risiko konflik sosial. Misalnya, penelitian Roberts dan Gordon (2016) di Afrika Selatan mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap kejahatan, yang diperburuk oleh kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, dapat memperburuk fragmentasi sosial.

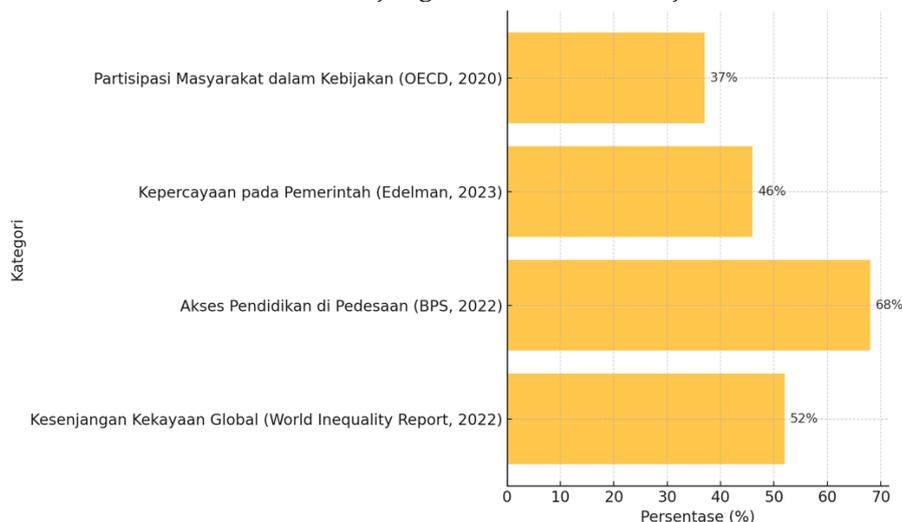
Penting juga untuk mencatat bahwa banyak kebijakan pemerintah sering kali tidak mencerminkan realitas sosial masyarakat. Scott (2011) menunjukkan bahwa pemerintah sering kali gagal memanfaatkan opini publik positif dan justru berfokus pada isu-isu yang tidak prioritas bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam data dari UNDP (2021), yang menunjukkan bahwa 45% masyarakat di negara berkembang menganggap kebijakan sosial pemerintah tidak relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, kurangnya sensitivitas budaya dan sosial dalam desain kebijakan sering memperparah kesenjangan ini. Ezzy et al. (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks Australia, kebijakan yang tidak sensitif terhadap keragaman budaya dan agama justru memperburuk ketidakadilan sosial dan mengikis pluralisme demokratis.

Di Indonesia, misalnya, program-program yang bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial sering menghadapi hambatan implementasi karena tidak memperhitungkan konteks lokal. Dampak dari kebijakan yang tidak inklusif juga terlihat dalam bidang

pendidikan. Penelitian Roberts dan Gordon (2016) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak memperhitungkan kebutuhan lokal dapat memperburuk ketakutan dan ketidakpuasan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi kohesi sosial. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa hanya 68% anak-anak di daerah pedesaan memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai, mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan pendidikan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi isu krusial dalam menciptakan kohesi sosial.

Fan et al. (2022) menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah fondasi dalam membangun kohesi sosial. Namun, survei Edelman Trust Barometer (2023) menunjukkan bahwa hanya 46% masyarakat global yang percaya pada institusi pemerintah, sebuah tren yang mengkhawatirkan. Sementara itu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan suara masyarakat sering kali memperburuk ketidaksetaraan sosial. Dwyer dan Parutis (2022) mencatat bahwa kebijakan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kohesi sosial sering gagal mengatasi ketimpangan yang ada, yang justru memperburuk marginalisasi kelompok tertentu. Hal ini diperkuat oleh data World Inequality Report (2022) yang menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya di dunia memiliki lebih dari 52% total pendapatan global, menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi belum berjalan efektif.

Gambar 1. Persentase Kesenjangan Sosial dan Kebijakan Pemerintah



Sumber: (Peneliti, 2024)

Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tangcharoensathien (2023) menyarankan bahwa optimalisasi basis data sipil dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih relevan dan inklusif. Selain itu, penerapan analisis jaringan sosial seperti yang diusulkan oleh Muthathi et al. (2021) dapat membantu pemerintah memahami dinamika sosial yang ada dan merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesenjangan antara ideal keharmonisan sosial dan realitas kebijakan pemerintahan dapat diminimalkan melalui partisipasi masyarakat, pemahaman konteks lokal, dan desain kebijakan yang inklusif. Pemerintah harus melihat masyarakat sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai penerima kebijakan. Dengan demikian, kita dapat berharap untuk mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan kohesif.

### 3.2 Urgensi Komunikasi Islam dalam Kebijakan Pemerintahan untuk Mewujudkan Keharmonisan Sosial

Komunikasi Islam memiliki posisi strategis dalam kebijakan pemerintahan untuk mendukung terciptanya keharmonisan sosial, terutama dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Komunikasi Islam, dengan prinsip musyawarah dan keadilan,

menyediakan dasar yang kokoh untuk menciptakan interaksi yang inklusif dan partisipatif. Prinsip ini sejalan dengan temuan Sulaiman et al. (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan yang mengedepankan musyawarah menciptakan nuansa baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi Islam bukan hanya alat penyampaian pesan, tetapi juga mekanisme untuk membangun kepercayaan, memahami kebutuhan masyarakat, dan menciptakan stabilitas sosial.

Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan kebijakan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan oleh Hasan dan Risfandy (2021). Mereka menemukan bahwa komunikasi yang berbasis nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam konteks pendidikan Islam, keberadaan pesantren dapat menjadi model komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal. Komunikasi semacam ini membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam komunitas dengan tingkat pendidikan atau akses informasi yang terbatas.

Lebih jauh lagi, komunikasi Islam memiliki potensi untuk meredam konflik sosial. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti dialog yang terbuka dan menghormati perbedaan, dapat mencegah polarisasi dan memperkuat solidaritas. Penelitian Sarnoto et al. (2021) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pesantren selama pandemi COVID-19 memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk merespons tantangan sosial yang kompleks dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah diterima secara luas. Di sisi lain, komunikasi Islam juga berperan dalam mendorong inklusivitas kebijakan ekonomi.

Alam (2018) menekankan pentingnya komunikasi Islam dalam mendukung ekonomi syariah yang inklusif. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan ini untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih relevan dan adil. Contohnya adalah upaya mempromosikan zakat sebagai alat redistribusi kekayaan, yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, komunikasi Islam membantu menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Selanjutnya, komunikasi Islam dapat membantu pemerintah mengelola isu-isu sosial yang sensitif, seperti radikalisme. Aksamawanti dan Ridwan (2022) menyoroti bahwa kebijakan pendidikan Islam dapat mengurangi potensi radikalisme dengan membangun pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan kohesif. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang mendukung dialog dan kolaborasi, komunikasi Islam memberikan landasan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan sosial yang tidak inklusif sering kali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis nilai, seperti komunikasi Islam. Rahayu (2022) menegaskan bahwa kebijakan yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi Islam, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara lebih efektif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi Islam juga memainkan peran penting dalam penguatan identitas sosial. Sono (2023) menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal.

Hal ini sangat relevan dalam masyarakat yang multikultural, di mana keseimbangan antara keberagaman dan persatuan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, komunikasi Islam dapat menjadi alat untuk mempromosikan dialog dan

toleransi antar kelompok. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah fondasi untuk menciptakan stabilitas sosial. Fanani (2022) menyoroti bahwa pemimpin yang menggunakan pendekatan komunikasi Islam, seperti musyawarah dan dialog terbuka, lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kepercayaan ini penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Komunikasi Islam juga dapat membantu pemerintah mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan, terutama di daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa akses yang terbatas ke fasilitas pendidikan dan ekonomi sering kali memperburuk ketimpangan sosial (Edison, 2023). Dengan pendekatan komunikasi yang berbasis nilai-nilai Islam, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dan merancang kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Komunikasi Islam memberikan peluang bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai. Pemerintah harus memandang komunikasi ini bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi sebagai strategi untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif dengan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memahami kebutuhan mereka, dan merancang kebijakan yang mencerminkan aspirasi mereka, pemerintah dapat mewujudkan keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

#### **IV. SIMPULAN**

Komunikasi Islam, dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan inklusivitas, memberikan landasan strategis untuk membumikan keharmonisan sosial melalui kebijakan pemerintahan. Sebagai pendekatan yang mengedepankan dialog terbuka dan penghormatan terhadap keberagaman, komunikasi Islam mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, serta meredakan konflik sosial. Nilai-nilai Islam, seperti keadilan dalam redistribusi kekayaan melalui zakat atau pemberdayaan pendidikan berbasis nilai lokal, mendukung terciptanya kebijakan yang relevan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan budaya, menciptakan rasa kepemilikan bersama, serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pendekatan ini tidak hanya membangun stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat pluralisme demokratis dan mendorong terciptanya keharmonisan yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aksamawanti, A., & Ridwan, R. (2022). Aceh province's local policy in an effort to develop sharia economy. *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, 185–195. <https://doi.org/10.24090/icontrees.2022.242>
- Alam, L. (2018). Islamization, piety, fundamentalism: Religious movement in campus. *Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies*, 4(2), 104. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v4i2.785](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.785)
- Alfiana, R., Zyahra, R., Afandi, Y., & Hardjati, S. (2021). Good governance: grant service research. *Journal Publicuho*, 4(2), 271. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17713>
- Chatra, M. A., Achjar, K. A. H., Ningsi, Rusliyad, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Analisis Data*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cheung, C. and Leung, K. (2012). Social inclusion of the older population in response to the 2008 financial tsunami in Hong Kong. *Ageing and Society*, 33(1), 64-88. <https://doi.org/10.1017/s0144686x12000554>

- Creswell, W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Dodi, L. (2023). Harmony of relations between religious people and conflict resolution in Kediri. *Addin*, 16(2), 193. <https://doi.org/10.21043/addin.v16i2.18141>
- Dwyer, M. & Parutis, V. (2022). Policymakers on social cohesion: contradictory expectations for child and family social work. *European Journal of Social Work*, 26(2), 258-271. <https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2040434>
- Edison, E. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134-147. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Ekman, P. (1992). *An Argument for Basic Emotions: Cognition and Emotion*. Cambridge: Academic Press.
- Ezzy, D., Bouma, G., Barton, G., et al. (2020). Religious diversity in Australia: Rethinking social cohesion. *Religions*, 11(2), 92. <https://doi.org/10.3390/rel11020092>
- Fan, J., Wen-hui, L., & Zheng, H. (2022). Government's impression management strategies, trust in government and social cohesion: Evidence from Songjiang University Town, China. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.951579>
- Fanani, Z. (2022). Kekuasaan dan otoritas kepemimpinan kyai dalam proses pengambilan keputusan di Ponpes PPAI Daarussalam Wagir Malang. *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 5(2), 221-230. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.72>
- Fatih, M. (2018). Dialog dan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam pemikiran A. Mukti Ali. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 13(01), 38. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1301-03>
- Godfrey, J. J. (1987). *A Philosophy of Human Hope*. Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-3499-3>
- Han, J., & Liang, N. (2015). In their own eyes and voices. *Organizational Behavior Teaching Review*, 39(6), 741-773. <https://doi.org/10.1177/1052562915582268>
- Hasan, A., & Risfandy, T. (2021). Islamic banks' stability: Full-fledged vs Islamic windows. *Journal of Accounting and Investment*, 22(1), 192-205. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10287>
- Insole, C. J. (2013). The Realist Hope: A Critique of Anti-Realist Approaches in Contemporary Philosophical Theology. In *The Realist Hope: A Critique of Anti-Realist Approaches in Contemporary Philosophical Theology*. UK: University of Cambridge. <https://doi.org/10.1080/15665399.2009.10820006>
- Lomas, T. (2021). Life balance and harmony. *International Journal of Wellbeing*, 11(1), 50-68. <https://doi.org/10.5502/ijw.v11i1.1477>
- Miles, B. Mathew. H. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Miyazaki, H. (2004). *The Method of Hope: Anthropology, Philosophy, and Fijian Knowledge*. California: Stanford University Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Muthathi, I., Kawonga, M., & Rispel, L. (2021). Using social network analysis to examine inter-governmental relations in the implementation of the Ideal Clinic Realisation and Maintenance programme in two South African provinces. *Plos One*, 16(5), e0251472. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251472>
- Pertiwi, I. (2023). Integration of social identities in interreligious-group relations. *Jurnal Psikologi*, 50(3), 219. <https://doi.org/10.22146/jpsi.86182>
- Rahayu, Y. (2022). Implication of refocusing policy on education financing in state Islamic universities during COVID-19 pandemic. *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 11-19. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.18477>

- Roberts, B., & Gordon, S. (2016). Pulling us apart? The association between fear of crime and social cohesion in South Africa. *South African Crime Quarterly*, 55. <https://doi.org/10.17159/2413-3108/2016/i55a390>
- Sarnoto, A., et al. (2021). Urgency of education crisis management based on Islamic boarding schools during the COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1764-1774. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns3.2000>
- Scott, D. (2011). Trends in social activism across Australian minority communities. *Journal of Social Inclusion*, 2(1), 53-64. <https://doi.org/10.36251/josi24>
- Sinaga, R., Tanjung, F., & Nasution, Y. (2019). Local wisdom and national integration in Indonesia: A case study of inter-religious harmony amid social and political upheaval in Bunga Bondar, South Tapanuli. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v3i1.4482>
- Sono, M. (2023). The effect of sharia financing availability on economic growth of MSMEs in Sukabumi. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(11), 1156-1164. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i11.385>
- Sulaiman, W., Lubis, K., Baihaqi, M., Musriparto, Marhaban, & Nur, M. (2024). Aceh government policy in preventing radicalism through the existence of Dayah Islamic education. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 189-208. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i2.4118>
- Tangcharoensathien, V. (2023). Children orphaned from COVID-19 in Thailand: Maximize use of civil registration database for policies. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1260069>
- Ule, A. (2019). Harmony as an ethical and political idea. *Asian Studies*, 7(1), 115-128. <https://doi.org/10.4312/as.2019.7.1.115-128>
- Williamson, H., & Murphy, K. (2020). Animus toward Muslims and its association with public support for punitive counter-terrorism policies: Did the Christchurch terrorist attack mitigate this association? *Journal of Experimental Criminology*, 18(2), 343-363. <https://doi.org/10.1007/s11292-020-09450-x>